

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR MELALUI JUMLAH PENDUDUK

ANDI AFIQ FAUZAN



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR MELALUI JUMLAH PENDUDUK

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

ANDI AFIQ FAUZAN

A11116501



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR MELALUI JUMLAH PENDUDUK

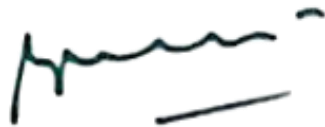
Disusun dan diajukan oleh

ANDI AFIQ FAUZAN A11116501

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Januari 2022

Pembimbing I



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA, Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si
NIP. 19770913 200212 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Sanusi Fattah, SE., M.Si. NIP
19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR MELALUI JUMLAH PENDUDUK

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI AFIQ FAUZAN

A11116501

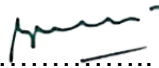
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

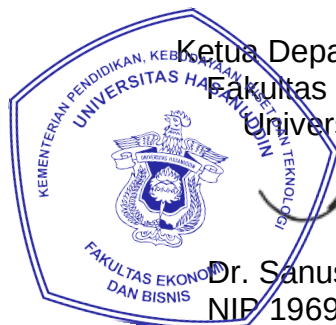
pada tanggal **31 Januari 2022** dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri , MA. Ph.D.	Ketua	1 
2.	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Anggota	3 
4.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.	Anggota	4 



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

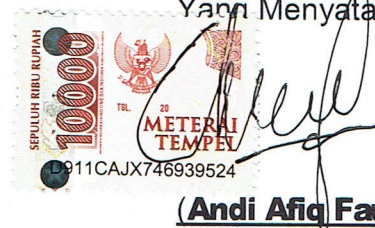
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andi Afiq Fauzan**
Nomor Pokok : A11116501
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Melalui Jumlah Penduduk*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 Maret 2022

Yang Menyatakan


(**Andi Afiq Fauzan**)

A11116501

PRAKATA

Dengan mengucap syukur alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, hidayah, dan anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai sebaik baik suri tauladan di muka bumi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Melalui Jumlah Penduduk**” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ir.H.Abdul Muis dan Hj.Andi Namira) yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil serta senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya khususnya kepada penulis dan terima kasih juga kepada segenap keluarga yang telah membantu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan sekaligus penasehat akademik yang selalu

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis saat berproses di bangku perkuliahan hingga penulis mendapatkan gelar sarjana, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap ilmu, kemudahan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

3. Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas kesabaran serta kemudahan yang diberikan kepada penulis karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., Ma. dan bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si. selaku dosen penguji, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
6. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Dr. Sanusi Fattah. SE., M.Si., dan ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi, dan beserta Staff Departemen Ilmu Ekonomi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang senantiasa diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan saran yang telah diberikan dan pemberian data penelitian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman saya terkhusus C421 dan lelaki petarung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
10. Kepada saudara seperjuangan di Ilmu Ekonomi 2016 "SPHERE", teman-teman organisasi "HIMAJIE FEB UH dan UKM PA EQUILIBRIUM FEB UH".
11. Teman KKN-T Gelombang 102 Unhas Kabupaten Bantaeng Kecamatan Bissappu Desa Bonto Cinde terutama Afif, Rio, Ummu, Raiza, Esti, Dea, Syita, Neysa, Raisa. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dalam cerita masa kuliah saat ber-KKN.
12. Kepada saudara-saudara Ruko Family yang telah membantu dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
13. Kepada pendamping, penasehat, serta penyemangat penulis dalam melakukan kegiatan setiap hari dan terkhusus dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini “ Nurul Ulfayani SE.” terima kasih sebesar-besarnya atas segala yang telah diberikan.

14. Seluruh pihak yang belum sempat penulis sebutkan, terima kasih banyak atas bantuannya.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun karena penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, maka sepenuhnya berasal dari penulis.

Makassar, 5 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR MELALUI JUMLAH PENDUDUK

Andi Afiq Fauzan
Yusri Zamhuri
Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk, dan juga untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk dari tahun 2000 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Variabel dependen yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah dari tahun 2000 hingga 2020. Teknik analisis yang digunakan adalah *Two Stage Least Squares (2SLS)* dan regresi linear berganda dengan menggunakan data time series dari tahun 2000-2020. Berdasarkan perhitungan *Two Stage Least Squares* didapatkan hasil $TSLS > 1$, memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk termasuk memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Sedangkan berdasarkan regresi linear berganda, dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk sedangkan pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND PERKAPITA INCOME ON ORIGINAL INCOME OF MAKASSAR CITY THROUGH THE NUMBER OF POPULATION

Andi Afiq Fauzan
Yusri Zamhuri
Retno Fitrianti

This study aims to determine the effect of economic growth on Makassar's original regional income through population, and also to determine the effect of per capita income on Makassar's original regional income through population from 2000 to 2020. This study uses three independent variables, namely economic growth, per capita income and population. The dependent variable used is local revenue from 2000 to 2020. The analytical technique used is Two Stage Least Squares (2TSLS) and multiple linear regression using time series data from 2000-2020. Based on the calculation of Two Stage Least Squares, the results of TSLS>1, means that economic growth has an influence on regional original income, which means that economic growth has an influence on Makassar's original regional income through the number of residents including making a good contribution to Makassar City's Original Income. . Meanwhile, based on multiple linear regression, it can be seen that the results of this study indicate that economic growth has an influence on the original income of the Makassar city through the population, while the per capita income has an influence on the Makassar city's original income through the population.

Keywords: *Economic Growth, Per capita Income, Total Population, Regional Original Income.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan teori	14
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	29
2.1.3 Pendapatan Perkapita	32

2.1.4 Jumlah Penduduk.....	34
2.2 Hubungan Antar Variabel	38
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Jumlah Penduduk.....	38
2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah	39
2.2.3 Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Jumlah Penduduk	40
2.2.4 Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Pendapatan Asli Daerah	41
2.2.5 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah...	41
2.3 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris	42
2.4 Kerangka Pikir	44
2.5 Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	46
3.2 Jenis dan Sumber Data	46
3.2.1 Jenis Data	46
3.2.2 Sumber Data.....	46
3.3 Metode Pengambilan Data	47
3.4 Model Analisis Data	47
3.5 Definisi Operasional	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	52
4.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2000 – 2020	52
4.1.2 Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kota Makassar Tahun 2000 - 2020	55
4.1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar Tahun 2000 - 2020	58

4.1.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun 2000 – 2020	59
4.2 Hasil Estimasi Variabel – Variabel Penelitian	60
4.3 Analisis dan Implikasi Hasil Penelitian	64
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Jumlah Penduduk	64
4.3.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Jumlah Penduduk	66
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran Data Penelitian	73
Lampiran 1. Data Penelitian	73
Lampiran 2. Data Regresi	77
Lampiran 3. Surat Penelitian	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	45
4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2000-2020	53
4.2 Pendapatan Perkapita Kota Makassar menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2021	56
4.4 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2000 – 2020	58
4.5 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2000 – 2020	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2016 – 2019	5
4.1 Hasil Interpretasi Data	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan secara mandiri suatu daerah dalam mengelola sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Perubahan kebijakan sistem pemerintah dari sentralisasi ke sistem desentralisasi mengharuskan setiap pemerintah daerah harus siap dalam kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar setiap daerah mampu membiayai pembangunan daerah masing-masing sesuai pada prinsip daerah otonomi yang nyata.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah yang menimbulkan adanya pembagian keuangan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang membutuhkan dukungan dari segi pendanaan. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai berkurang dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Meningkatkan penerimaan fiskal suatu daerah, pemerintah daerah memberlakukan pungutan dan pajak, pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan daerah masing-masing, namun pemberian bantuan dari pemerintah pusat seharusnya diberikan seminimal mungkin, agar PAD menjadi bagian yang terpenting sebagai sumber keuangan terbesar daerah serta dukungan oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sehingga menjadi prasyarat dalam sistem tata negara.

Pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan suatu negara. Setiap negara khususnya negara berkembang pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDB suatu negara. Tingginya nilai PDB diasumsikan bahwa kondisi perekonomian suatu negara tersebut juga baik. Peningkatan PDB menunjukkan adanya pertumbuhan atau aktivitas perekonomian yang dapat mendorong naiknya pendapatan maupun produksi nasional.

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah laju pertumbuhan PDRB Kota Makassar disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu

: pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih konstruksi; perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, hotel dan penginapan, persewaan dan jasa perusahaan.

Untuk itu perlu adanya usaha peningkatan kemampuan dibidang ekonomi di Kota Makassar melalui analisis pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan pendekatan basis ekonomi, pendekatan basis ekonomi ini ditujukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling unggul dan strategis untuk dikembangkan, analisis keterkaitan antar daerah sekawasan dengan Kota Makassar sebagai pelengkap sehingga dapat diketahui sejauh mana daerah tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi. Indonesia berada pada posisi ke 4, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesejahteraan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur juga pelayanan publik dan menyeimbangkan upah seseorang pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Dan pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung pembangunan karena adanya pertambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar.

Bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diwarnai dengan munculnya masalah-masalah akibat kehidupan penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di beberapa sektor

menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan misalnya permasalahan yang umum terjadi di Indonesia. Seperti yang telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar mengenai studi kota, bahwa penduduk akan bertempat tinggal di Kota dan kawasan sekitar Kota. Hal ini didasarkan bahwa jumlah penduduk kota di dunia mempunyai kecenderungan makin besar dan tidak terkecuali pada Kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang tumbuh cepat secara alamiah baik dilihat dari jumlah penduduknya maupun dari kemampuan ekonominya yang berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana.

Sebagai ukuran kemajuan sering dipergunakan Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, (GNP) atau pendapatan perkapita. Tujuan pembangunan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang dapat digambarkan melalui pendapatan nyata perkapita, sedangkan mutu kehidupan tercermin dari tingkat dasar pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dengan tujuan mempertahankan derajat hidup manusia secara wajar.

Pendapatan yang diperoleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier. Selain itu pendapatan diperuntukkan/disisihkan untuk tabungan mereka pada masa yang akan datang, dengan harapan segala kesulitan/hambatan dapat diatasi dengan tersedianya tabungan seperti, untuk kesehatan, pendidikan terutama bagi mereka dan anak-anak pada masa yang akan datang, pengeluaran biaya transportasi dan lainnya.

Pendapatan merupakan hasil berupa uang atau material lainnya. Pendapatan yang diterima oleh subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang diserahkan yaitu pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari proyek yang dilakukan sendiri atau perorangan dan pendapatan yang diperoleh seseorang berasal dari kekayaan sektor sub sistem.

Pola konsumsi berhubungan dengan pendapatan rumah tangga apabila pendapatan konstan, sedangkan konsumsi meningkat, maka rumah tangga harus menurunkan pola konsumsi pada tingkat yang rendah, jika tidak maka rumah tangga akan mengalami ketidak mampuan konsumsi, karena pendapatan tidak meningkat sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia (Todaro, 2012).

Penerapan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk mengembangkan potensi daerah yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Peningkatan yang dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik sehingga mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik. Maka dari itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih

rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Pajak daerah bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi daerah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan maupun kesehatan, membiayai anggota polisi, membiayai kegiatan pemerintah, serta kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti barang publik. Melihat dari begitu banyak kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maka penarikan pajak akan semakin ditingkatkan untuk menyongsong pembangunan suatu daerah maka seiring meningkatnya jumlah penduduk, perekonomian dan stabilitas publik maka pajak daerah akan semakin meningkat pula sehingga pajak memegang peranan penting dalam pembangunan daerah.

Pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah kota, maka diklasifikasikan menjadi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan. Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Suparmoko (1987:94) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas sarana atau fasilitas yang masyarakat terima dari pemerintah daerah. Retribusi akan dikenakan pungutan kepada masyarakat apabila masyarakat telah menerima suatu pelayanan. Berbeda hal dengan pajak, pajak yang merupakan kewajiban kepada seluruh masyarakat untuk membayar tanpa menunggu ada tidaknya pelayanan yang diterima masyarakat.

Secara garis besar terdapat 3 jenis retribusi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah agar bisa dimasukkan kedalam kas daerah yaitu : Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang pemungutan biayanya berasal dari pelayanan yang berupa pelayanan publik yang telah diterima oleh masyarakat. Jadi, retribusi akan dilakukan oleh masyarakat apabila pemerintah daerah menyediakan suatu pelayanan masyarakat disuatu daerah. Seperti, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pendidikan, pelayanan prasarana (air, listrik, persampahan), dan lain-lain. Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang pemungutannya dilakukan karena adanya kegiatan usaha. Seperti pasar atau pertokoan, tempat parkir, tempat pelelangan, tempat penginapan, dan lain-lain. Retribusi jasa usaha intinya berhubungan dengan pemungutan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Retribusi khusus atau

perizinan tertentu dapat berupa perizinan dalam mendirikan suatu bangunan, perizinan perpanjangan bangunan kontrak, atau perizinan trayek, dan lain lain. Pembayaran dari retribusi jasa di atas digunakan untuk memenuhi pelayanan atau kegiatan yang berkaitan dengan yang bersangkutan seperti retribusi pendidikan maka pembiayaan atas retribusi pendidikan digunakan untuk memenuhi pelayanan dan memenuhi kebutuhan pendidikan.

Kemudian penerimaan daerah selanjutnya berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah merupakan semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Dimaksudkan

dalam pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud yaitu : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Dari Tahun 2016 - 2019 (Dalam Satuan Juta Rupiah)

Uraian	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
Pendapatan Pajak Daerah	1.053.182	752.142	1.059.991	938.796	1.155.991	942.551	1.315.000	1.067.323
Pendapatan Retribusi Daerah	139.444	128.471	101.559	72.788	136.430	57.277	132.348	68.097
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	19.070	15.562	45.287	45.023	50.002	49.463	37.809	18.225
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	74.370	75.683	278.027	280.623	160.986	136.160	139.617	149.670
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.286.066	971.858	1.484.864	1.337.230	1.503.409	1.185.451	1.624.774	1.303.315

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2016 - 2019

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa Data sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah hampir semua sumber tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari objek sumber pendapatan asli daerah untuk berkontribusi yang dalam pelaksanaannya masih belum maksimal oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2016 PAD Kota Makassar hanya mencapai sebesar 81,72% dari target yang ditetapkan, hal ini menggambarkan bahwa pada tahun ini tingkat upaya pajak objek pajak masih

relatif rendah karena dari sisi pajak daerah persentase pencapaian hanya sebesar 71,42%. Belum dapat dijadikan pedoman bahwa realisasi pajak daerah yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kota Madya Makassar.

Berbeda dengan Realisasi PAD tahun 2016, pada data realisasi PAD Kota Makassar tahun 2017 diatas pencapaian pemerintah daerah mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun tersebut karena dari tahun sebelumnya yaitu 75,57% naik menjadi 86,55% dari target yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan terbesar yaitu pajak daerah mengalami peningkatan pendapatan yang cukup baik, namun belum memenuhi target dari uraian sumber PAD Kota Makassar tahun 2017 hampir semua tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal seperti ini disebabkan karena masih kurang maksimumnya kinerja pemerintah daerah Kota Madya Makassar dalam menerapkan potensi Pendapatan Asli Daerah

Total data realisasi PAD Kota Makassar tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 yang dimana persentase pencapaiannya mencapai 90,06%, namun di tahun 2018 hanya sebesar 74.14% hal ini menandakan bahwa potensi PAD Kota Madya Makassar cukup besar namun kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyerap masih kurang maksimum sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari semua sumber-sumber PAD tidak ada satu pun yang memenuhi target pencapaian, hal ini juga disebabkan oleh uraian sumber pendapatan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 41,98%, jumlah ini sangat rendah mengingat pada tahun- tahun sebelumnya realisasi pendapatannya hampir memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rastina (2016) Pada penelitian berjudul Analisis kontribusi PAD terhadap kemandirian keuangan kota Makassar dengan menggunakan data tahun 2010 sampai 2014 yang dimana hasil penelitian yang ditunjukkan adalah dominasi sumber PAD terbesar hanya pajak daerah, dan persentase hasil penelitian sangat jauh antara pajak daerah dengan sumber PAD lainnya. Kemandirian keuangan Kota Makassar pada penelitian tersebut masih tergolong rendah yang dikarenakan peran pemerintah dalam mendanai belanja daerah kota Makassar masih sangat tinggi dibandingkan sumber pendapatan asli daerah yang diterima.

Sumber pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi belanja daerah kota Makassar maka apabila terdapat penelitian yang dapat mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah maka pemerintah dapat menjadikan penelitian tersebut sebagai acuan pencapaian sumber PAD. Dari penelitian ini juga akan memberikan gambaran terhadap pemerintah dalam merancang target PAD pada tahun berikutnya.

Jumlah PAD Kota Makassar mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi PAD yang dalam pelaksanaannya masih belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah. Fenomena ini yang merupakan salah satu yang akan dilihat dalam penelitian ini tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita secara langsung maupun secara tidak langsung melalui jumlah penduduk.

Terdapat banyak faktor-faktor pendapatan asli daerah yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dan hal inilah yang akan diukur

sejauh mana keuangan daerah berhasil dikelola karena keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta mengurangi alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR MELALUI JUMLAH PENDUDUK”**

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui jumlah penduduk ?
- Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui jumlah penduduk ?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah melalui jumlah penduduk
- Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah melalui jumlah penduduk

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi Universitas Hasanuddin

Penelitian ini dapat menambah koleksi kepustakaan dan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin dapat digunakan sebagai bahan referensi

2. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi penambah pengetahuan lewat proses yang dilakukan selama melakukan penelitian dan dalam proses penulisan dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini sebagai tambahan informasi dan bahan acuan untuk mengambil keputusan dalam penetapan target pendapatan asli daerah dalam rangka memaksimalkan potensi daerah terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 (pasal 157) tentang pemerintah daerah,

sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah: (a) Pajak daerah: pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, (b) Retribusi: pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, (c) Perusahaan milik daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan yang bertujuan untuk turutserta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur, (d) Pendapatan daerah yang sah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas (1989), bahwa: kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung

Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk membayar barang dan jasa yang dihasilkannya. Tujuan utama dari beberapa prinsip umum perpajakan dan mengevaluasinya adalah untuk memahami dampak dari sumber berbagai pajak yang digunakan untuk membiayai pemerintah. Untuk sepenuhnya memahami dampak dari pajak atas ekonomi, sistem pajak harus dianalisis secara keseluruhan karena efek dari satu jenis pajak akan tergantung pada bagaimana pajak yang berinteraksi dengan ketentuan jenis pajak lainnya.

Pajak merupakan pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

Pajak merupakan modal dasar pembangunan. Hal ini telah dilakukan pada RAPBN 2001. Lebih dari dua pertiga modal dasar pembangunan adalah berasal dari pajak. Mekanisme bekerjanya sistem pajak seperti ini dapat dijelaskan seperti berikut. Pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa multiplier effect dalam bentuk, misalnya employment creation dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan

terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi). Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai forced saving, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal.

Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

a. Pajak Hotel

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumahpenginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.1.1.2 Retribusi daerah

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan

Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

-Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

- Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

- Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

-Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
- Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau

dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

- Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
- Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

-Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Peranan Badan Usaha Milik Daerah

Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- Peningkatan produksi;
- Perluasan kesempatan kerja
- Peningkatan pendapatan daerah

Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah:

- melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;

- pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan
- menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Dan secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMD berorientasi sekaligus pada kedua motive yaitu bidang bisnis (profit service) dan pelayanan umum (public service), maka ukuran/kriteria peranannya dapat dilihat dari :

- Kedudukan dalam pasar (market share).
- Sumbangan pada keuangan Pemerintah Daerah.
- Sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah.

Sedangkan untuk BUMD yang bergerak di bidang kemanfaatan umum (public utility), maka indikator keberhasilan tersebut akan tampak dari kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai. Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan

dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD yang bergerak dalam bidang public service dan profit motive.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Keempat sumber tersebut akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi sudah banyak dirumuskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh para ekonom. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2004).

Boediono (1999) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan di sini adalah pada proses karena mengandung unsur perubahan dan indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain (Sukirno, 2012).

Todaro (2003) mengatakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi. Selanjutnya ditambahkan oleh Mankiw (2003) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) bukan indikator lainnya di antaranya adalah bahwa PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Menurut Tarigan (2005) dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu

jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh seluruh sector perekonomian di wilayah itu. Sedangkan pendapatan per kapita adalah total pendapatan wilayah/daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduknya untuk tahun yang sama. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Todaro, 1998).

Beberapa teori yang tentang pertumbuhan ekonomi antara lain, teori pertumbuhan ekonomi klasik (teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dan Teori pertumbuhan Neo Klasik).

Teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan ekonomi dari segi permintaan. Dimana pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat (melalui kenaikan investasi) bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan (tingkat pertumbuhan itu dinamakan tingkat pertumbuhan yang perlu dijamin atau warranted rate of growth). Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional.

Adapun Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan yang memunculkan teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada

pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

Selanjutnya, menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan ini, rasio modal output ($\text{capital-output ratio} = \text{COR}$) bisa berubah. Dengan adanya keluwesan ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan.

2.1.3 Pendapatan Perkapita

Untuk memperoleh pengertian tentang pendapatan, maka harus dilihat dari mana pendapatan tersebut dibentuk dan bagaimana proses pembentukannya karena pendapatan itu sendiri menjelaskan jumlah penerimaan yang diperoleh individu, masyarakat, produsen, perusahaan Daerah, Negara dan sebagainya. Sebagai hasil usaha kompensasi yang diterima dalam kegiatan ekonomi melalui produksi barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan (Tambunan, 2001).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu Negara/wilayah/daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2007).

Menurut Sukirno (2003), Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk sesuatu Negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai produk domestik bruto atau produk

nasional bruto suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk, oleh sebab itu

Untuk memperoleh pendapatan perkapita pada suatu tahun, yang harus dilakukan adalah membagi pendapatan daerah pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. jika tingkat pendapatan rendah tabungan masyarakat akan mengalami keadaan negatif, ini berarti masyarakat menggunakan tabungannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari, baru setelah pendapatan perkapita melebihi pendapatan awal yang diterima masyarakat maka masyarakat akan menabung sebagian dari pendapatannya atau dengan kata lain kemampuan masyarakat untuk menabung mengalami peningkatan (Sukirno, 2002). Pendapatan perkapita merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah produk nasional bruto oleh jumlah keseluruhan penduduk. Semakin besar nilai pendapatan perkapita, diasumsikan bahwa anggota masyarakat suatu Negara makin sejahtera dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil (Robinson, 2005). Ditinjau dari segi produksi disebut regional produk, merupakan jumlah netto oleh atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Ditinjau dari segi pendapatan disebut regional income, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam (satu tahun).

2.1.4 Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan kependuduk dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu dinyatakan dalam prosentase. Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi periode waktu unit, sering di artikan sebagai prosentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulai periode.

Kependudukan juga hal yang tidak lepas bisa lepas dari negara kita, disamping karena negara kita termasuk negara kita termasuk negara terbesar di dunia negara kita juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, berikut beberapa masalah kependudukan yang ada di indonesia.

1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi,
2. Penyebaran penduduk yang tidak merata,

3. Urbanisasi yang relatif tinggi,
4. Kualitas sumber daya manusia rendah,
5. Pernikahan usia dini, dan
6. Tingkat kelahiran yang sangat tinggi.

Dari beberapa faktor dalam poin di atas, tingkat kelahiran yang menjadi hal paling berpengaruh dalam meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah kelahiran dipengaruhi berbagai macam hal di antaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program yang telah digalakkan oleh pemerintah.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

a. Teori Malthus

Malthus berpendapat pada mulanya, yaitu pada ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan penduduk/tenaga kerja adalah relatif tinggi (yang berarti penduduk adalah relatif sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain), pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan taraf kamakmuran masyarakat. Akan tetapi, apabila jumlah penduduk/tenaga kerja adalah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain,

pertambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Model malthusian pada bukunya yang berjudul *An essay on the principle of population as it affects the future improvement of society*. (1766-1834). Memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut perkiraannya umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Malthus memulai dengan suatu catatan, bahwa “makanan penting bagi keberadaan manusia” kemudian “nafsu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. “ Dia menyimpulkan bahwa “kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia “Menurut Malthus satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah “kesengsaraan dan sifat buruk.” Akan tetapi, Malthus gagal melihat bahwa pertumbuhan dalam daya pikir manusia jauh melampaui dampak dari populasi yang terus bertambah. Pertanian, pupuk, mekanisasi peralatan pertanian, varietas bibit baru, dan berbagai kemajuan teknologi lainnya membuat petani sanggup menyediakan makanan bagi jumlah penduduk yang terus bertambah. Bahkan dengan jumlah mulut yang terus bertambah untuk di beri makan, hanya sedikit petani yang dibutuhkan karena setiap petani menjadi sangat produktif. Jumlah orang Amerika yang bekerja dibidang pertanian hanya di bawah 2%, namun mereka mampu menyediakan bahan pangan bagi seluruh negeri, bahkan mengekspor kelebihannya ke luar negeri

b. Teori John Stuart Mill

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun

demikian ia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktifitas seseorang tinggi ia cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah.

c. Teori Model Kremerian

Michael Kremer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut, Kremer dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemuan, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini. Kremer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia satu miliar (terjadi sekitar tahun 1800-an) dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta (sekitar tahun 500 SM). Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Temuan Kremer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian, diperoleh dengan membandingkan wilayah-wilayah di dunia. Mencarinya es kutub mengakhiri zaman es pada sekitar 10.000 SM yang mengakibatkan banjir besar didarat dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat melakukan komunikasi antar daerah. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat dari pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Ternyata memang terjadi, wilayah yang paling sukses di dunia pada tahun 1500 (ketika Colombus membangun kembali kontak teknologi) adalah peradaban “dunia lama” yang mencakup wilayah Eurasia-Afrika. Kremer

menyimpulkan dari semua bukti ini, bahwa populasi yang besar adalah prasyarat bagi kemajuan teknologi.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Pada sub-bahasan ini akan membahas hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli daerah.

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991: 125).

Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. menjelaskan bahwa jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Malthus, berpendapat tentang hubungan antara populasi, upah riil, dan inflasi. Ketika populasi buruh tumbuh lebih cepat dari pada produksi makanan, maka upah riil turun, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan biaya hidup yaitu biaya makanan naik. Ketika upah riil di suatu wilayah tinggi. dan Jawa Timur merupakan penduduk terpadat di Indonesia setelah Jakarta. (Arifin, 2011)

2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Gatot Dwi Adiatmojo dalam K Datu (2012) PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut BPS tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut. Menurut Susanto (2014) Hubungan PDRB Konstan terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian di 9 sektor ekonomi pada daerah.

Jika aktifitas ekonomi 9 sektor itu terjadi kenaikan, tidak dimungkinkan akan mempunyai pengaruh besaran PAD daerah, karena bahwa beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung. Dalam makro ekonomi terdapat istilah perhitungan pendapatan nasional produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB). PDB dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Sedangkan PNB adalah nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung. dalam analisis ekonomi selalu digunakan istilah "Pendapatan Nasional" istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan

dalam suatu Negara. Dengan demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili dari arti produk domestik bruto (Sukirno 2013, h. 35).

2.2.3 Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Jumlah Penduduk

Pendapatan perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Pendapatan perkapita sering dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Jika pendapatan perkapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi jasa dan fasilitas di daerah tersebut akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah retribusi daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi berbagai jasa dan fasilitas yang disediakan pemerintah menurun, maka jumlah retribusi di daerah tersebut akan menurun.

Tujuan akhir pembangunan dan kebijakan yang ingin dicapai oleh suatu daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana kebijaksanaan tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan cara membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Hasil bagi ini disebut sebagai pendapatan perkapita atau pendapatan tiap orang. "Semakin tinggi pendapatan perkapita sebuah daerah tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya". (Ausri, 2007: 41).

2.2.4 Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004: 423) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

2.2.5 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan Khusaini dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa, peranan pajak salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah, sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian.

Jadi apabila jumlah penduduk disuatu daerah mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi harus disertai dengan pembentukan modal, yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, melalui pemungutan pajak dan retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah.

Dari teori yang di kemukakan oleh Adam Smith diatas mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah jika penduduk di suatu negara/daerah itu selalu produktif, dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Malthus dan Richardo akan bahaya pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan negara miskin banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Disini pemerintah harus menambah dana bantuan untuk penduduknya yang miskin sehingga pengeluaran pemerintah semakin bertambah untuk bantuan sosial, sedangkan pajak dan retribusi yang dipungut tidak maksimal karena banyak penduduk miskin yang tidak mampu membayar pajak disebabkan pendapatan perkapita yang rendah.

2.3 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Penelitian Hidayat (2009) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatra Utara” dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa uji t dan analisa koefisien determinasi (R-square) ditemukan hubungan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Sumatra Utara pada tingkat signifikan 95%

Penelitian Siskawati (2014) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau” menyimpulkan dari hasil penelitiannya, dari hasil estimasi data panel dengan Fixed Effect Model secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena ada beberapa daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah selain itu seperti halnya dengan kabupaten Inhil dan kabupaten Kampar terjadi penurunan pertumbuhan pada komponen pajak daerah yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran oleh para wajib pajak dan retribusi menunaikan kewajibannya. Namun analisis secara simultan.

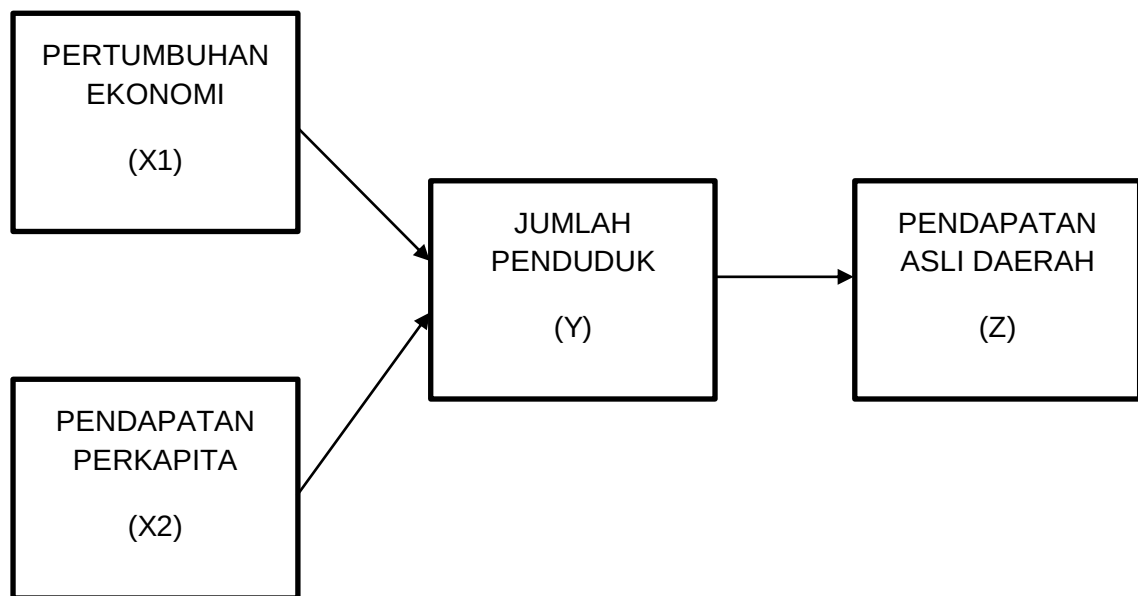
Menurut Wahidi (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Kalimantan timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, jumlah tabungan dan untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Kalimantan timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas (pendapatan perkapita, jumlah kendaraan dan jumlah tabungan) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan variabel terikatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari ketiga variabel bebas tersebut, variabel jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel yaitu $7,098 > 2,132$ dengan koefisien korelasi sebesar 0,801. Kemudian disusul masing-masing variabel pendapatan per kapita masyarakat dan jumlah tabungan menempati urutan kedua dan ketiga.

Menurut Transna Putra Urip (2004) dalam penelitiannya pengaruh pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Papua, menyimpulkan bahwa: pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.051% dan perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,709%.

Menurut H.Muhamad (2015) dalam penelitiannya tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Samarinda, menyimpulkan bahwa: variable bebas yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi sector pertanian, kontribusi sector pertambangan, kontribusi sector industri, kontribusi sector perdagangan dan kontribusi sector konstruksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan dengan landasan teori di atas maka penelitian ini mencoba menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebagai variable dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel independen yaitu jumlah penduduk.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Diduga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui jumlah penduduk